

Soroti Serapan Anggaran Pendidikan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 24/06/2024

SAMARINDA – Serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda jadi sorotan DPRD Samarinda. Pasalnya, dari anggaran Rp1 triliun, serapannya baru mencapai Rp800 miliar.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar baru-baru ini. Pihaknya pun sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Samarinda dengan Disdikbud pekan lalu.

Dipaparkan, rapat tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV, untuk menanyakan tentang progres penyerapan anggaran APBD Disdikbud Samarinda Tahun 2024. Serta beberapa usulan program APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025.

“Salah satu poinnya belum maksimalnya penyerapan anggaran Disdikbud Samarinda dan keterlambatan pembangunan puluhan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Samarinda,” terangnya.

Kader Partai Gerindra itu menegaskan, Disdikbud Samarinda memiliki porsi anggaran sebesar 20 persen dari APBD alias sekitar Rp1 triliun dari total Rp5,9 triliun. Namun serapannya baru masuk Rp800 miliar (80 persen).

“Kita harapkan mudah-mudahan nanti ini bisa dipenuhi sampai angka 20 persen. Proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang masih belum terselesaikan dapat segera tuntas. Karena berdasarkan informasi ada sekitar 70 gedung SD dan 20 gedung SMP membutuhkan rehabilitasi,” urainya.

Dia meminta Disdikbud Samarinda bisa melakukan percepatan terhadap pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Terlebih Deni mengklaim berdasarkan informasi masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan.

“Tentu harapan kami pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Dan seharusnya setelah pengesahan anggaran, percepatan pembangunan bisa segera dilakukan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin menyebut, kegiatan pembangunan tengah berjalan. Terkait serapan anggaran yang belum optimal diklaim lantaran ada kendala di birokrasi.

“Salah satu contoh yang terkendala birokrasi yakni tunjangan profesi untuk guru baru. Karena baru dibayarkan tiga bulan, padahal seharusnya enam bulan. Hal ini karena anggaran di PPKB (Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Belanja) belum sepenuhnya masuk,” bebernya.

Kemudian, hingga pekan kemarin beberapa kegiatan baru bisa dimulai, karena menunggu proses administrasi yang kompleks. “Ada beberapa kegiatan yang memang tidak dimulai di Januari atau Februari. Namun, kami tetap berusaha agar semua berjalan lancar,” tutup pria yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda tersebut. **(adv/kri)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Soroti Serapan Anggaran Pendidikan, 24/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
2. Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.